

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xv
INTISARI	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
1. Tujuan Subyektif	9
2. Tujuan Obyektif	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Akademis	9
2. Manfaat Praktis	10
E. Keaslian Penelitian	11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pembuktian Perkara Pidana	18
1. Arti Penting Pembuktian	18
2. Parameter Pembuktian/ Sistem Pembuktian	20
3. Alat-Alat Bukti.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Pemulihan Data	42
1. Pengertian Bukti Elektronik dan/atau Bukti Digital	42
2. Penggunaan Bukti Digital Dalam Pembuktian Pidana.....	46
3. Pemulihan Data	46
C. Tinjauan Umum Tentang Eksistensi Alat Bukti Elektronik Dalam Perspektif Politik Hukum	49
1. Pengertian Politik Hukum	50
2. Ruang Lingkup Politik Hukum.....	54
3. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	59
BAB III METODE PENELITIAN	63
A. Jenis Penelitian.....	63
B. Bahan Penelitian.....	64
1. Data Primer	64
2. Data Sekunder	66
a. Bahan Hukum Primer	66

b.	Bahan Hukum Sekunder	68
c.	Bahan Hukum Tersier	69
C.	Cara dan Alat Pengumpulan Data	69
D.	Jalannya Penelitian	71
1.	Tahap Persiapan	71
2.	Tahap Pelaksanaan	71
a.	Pelaksanaan penelitian kepustakaan	71
b.	Pelaksanaan penelitian lapangan	71
c.	Tahap Penyelesaian	72
E.	Analisis Data	72
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		74
A.	Pengaturan Alat Bukti Elektronik Hasil Pemulihan Data Dalam Pembuktian Perkara Pidana.....	74
1.	Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik Secara Kebendaan... 74	
a.	<i>Digital Property</i>	74
b.	<i>Virtual Property</i>	75
c.	<i>Personal Data/Data Pribadi</i>	75
2.	Pengaturan Alat Bukti Elektronik dan Perkembangannya	77
a.	Alat bukti elektronik berdasarkan berbagai Undang-Undang.....	77

b.	Klasifikasi Alat Bukti Elektronik Berdasarkan Beberapa Undang-Undang	95
c.	Sumber Ditemukannya Alat Bukti	127
d.	Perkembangan Alat Bukti Elektronik Dalam Putusan MK	137
e.	Aturan Internasional	140
3.	Kelemahan-kelemahan yang ada dalam pengaturan alat bukti elektronik	142
4.	Pengaturan Alat Bukti Elektronik Saat ini masih berpotensi menimbulkan persoalan normatif	144
5.	Akibat menghilangkan barang bukti	146
B.	Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Hasil Pemulihan Data Dalam Pembuktian Perkara Pidana	152
1.	Ilmu Bantu Hukum Acara Pidana Sebagai Sarana Membuktikan Kejahatan ...	155
a.	Sejarah Singkat Munculnya Bidang Digital Forensik	158
b.	Prinsip-prinsip digital forensik	163
2.	Proses <i>Data Recovery</i> /Pemulihan Data	166
a.	Definisi digital forensik	167
b.	Prosedur Digital Forensik	172
c.	Kondisi File Yang Hilang	189
d.	Memastikan keaslian data	191
3.	Kedudukan Alat Bukti Elektronik Hasil Pemulihan Data	194

4.	Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Hasil Pemulihan Data.....	198
C.	Kebijakan Formulasi Hukum Acara Pidana Kedepannya Untuk Membuktikan Fakta Hukum Melalui Alat Bukti Elektronik Hasil Pemulihan Data.....	209
1.	Ketiadaan Politik Hukum Yang Mapan dan Konsisten Mengakibatkan Beragamnya Pengaturan Alat Bukti Elektronik.....	212
2.	Harmonisasi Pengaturan Alat Bukti Elektronik.....	221
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		230
A.	Kesimpulan	230
1.	Pengaturan Alat Bukti Elektronik Hasil Pemulihan Data Dalam Pembuktian Perkara Pidana.....	230
2.	Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Hasil Pemulihan Data Dalam Pembuktian Perkara Pidana	231
3.	Kebijakan Formulasi Hukum Acara Pidana Kedepannya Untuk Membuktikan Fakta Hukum Melalui Alat Bukti Elektronik Hasil Pemulihan Data.....	231
B.	Saran.....	232
DAFTAR PUSTAKA		234
INDEKS ISTILAH		242
INDEKS SUBJEK.....		245
GLOSARIUM.....		246